

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Kabupaten merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membutuhkan sarana dan prasarana yang salah satunya adalah kantor pemerintahan. Kantor Pemerintahan Kabupaten sebagai wadah dari aktivitas/kegiatan pemerintahan daerah setempat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan melayani kepentingan umum di wilayah Kabupaten.

Untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam pembangunan khususnya Kabupaten Sukoharjo diperlukan sarana dan prasarana yang memadai yang salah satunya adalah kantor pemerintahan yang representatif. Sebagai kantor pemerintahan, bangunan perkantoran harus memiliki karakteristik bentuk yang spesifik.

Bangunan Kantor Pemerintah berupa kantor Bupati ini ditujukan untuk mewadahi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan kantor yang memadai diharapkan dapat menciptakan sistem atau mekanisme kinerja instansi pemerintah yang lebih terintegrasi dan menyeluruh, mewujudkan pola layanan pada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan fisik, ekonomi maupun sosial. Secara visual, kantor pemerintah harus mampu mencerminkan suatu lambang kedudukan

pusat pemerintahan.

Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dalam upaya mewujudkan visi dan misinya selalu melaksanakan penyempurnaan, pendayagunaan dan penataan terhadap keseluruhan unsur sistem pemerintahan yang pada pokoknya meliputi penataan organisasi, pemantapan disiplin manajemen, penyempurnaan terhadap masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan.

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kompleks kantor Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wujud untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang berkualitas dan professional. Dengan adanya perkembangan fungsi-fungsi di dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan antar fungsi-fungsi dalam tubuh Pemda serta pelayanan masyarakat umum dibutuhkan Kantor Pemerintahan dengan kebutuhan ruang dan tempat yang lebih luas dan memadai. Keadaan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo sendiri saat ini sudah tidak memenuhi syarat, dilihat dari struktur organisasi yang baru dengan struktur ruang yang ada saat ini. Selain itu lokasi instansi-instansi pemerintahan yang tersebar serta tidak terletak pada satu lingkungan sehingga menyulitkan koordinasi dan hubungan antar instansi serta menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan umum.

Sebagai solusi atas permasalahan diatas penulis bermaksud merencanakan dan merancang sebuah Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo yang representatif, dapat mewadahi stuktur organisasi yang baru juga dapat menciptakan kesan mengayomi dan dekat dengan masyarakat serta kontekstual dengan masyarakat disekitarnya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur (LP3A) ini adalah untuk meredesain Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo yang representatif sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2

tahun 2008 serta memberikan alternatif pemecahannya secara arsitektural.

1.2.2. Sasaran

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan *Redesain Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo* melalui aspek-aspek panduan perancangan (*design guide lines aspect*) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan Desain Grafis yang akan dikerjakan.

1.3. Manfaat

1.3.1. Secara subyektif

Sebagai pemenuhan salah satu persyaratan Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang nantinya digunakan sebagai pegangan dan pedoman dalam perancangan *Redesain Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo* untuk melanjutkan ke dalam proses Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir.

1.3.2. Secara obyektif

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan *Redesain Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo*, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan.

1.4. Lingkup Pembahasan

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan *Redesain Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo* termasuk dalam kategori penataan

bangunan masa banyak dan bercirikan modern tanpa meninggalkan unsur-unsur lokal, sesuai dengan kategori dalam kriteria penilaian grafis tugas akhir yang telah ditetapkan.

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Perencanaan dan perancangan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo ini berada di Jl. Jenderal Sudirman No.199, Kecamatan Sukoharjo.

1.5. Metode Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.5.1. Studi literatur

Studi literatur atau kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori, standar perancangan dan kebijaksanaan perencanaan dan perancangan melalui buku, katalog dan bahan-bahan tertulis lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

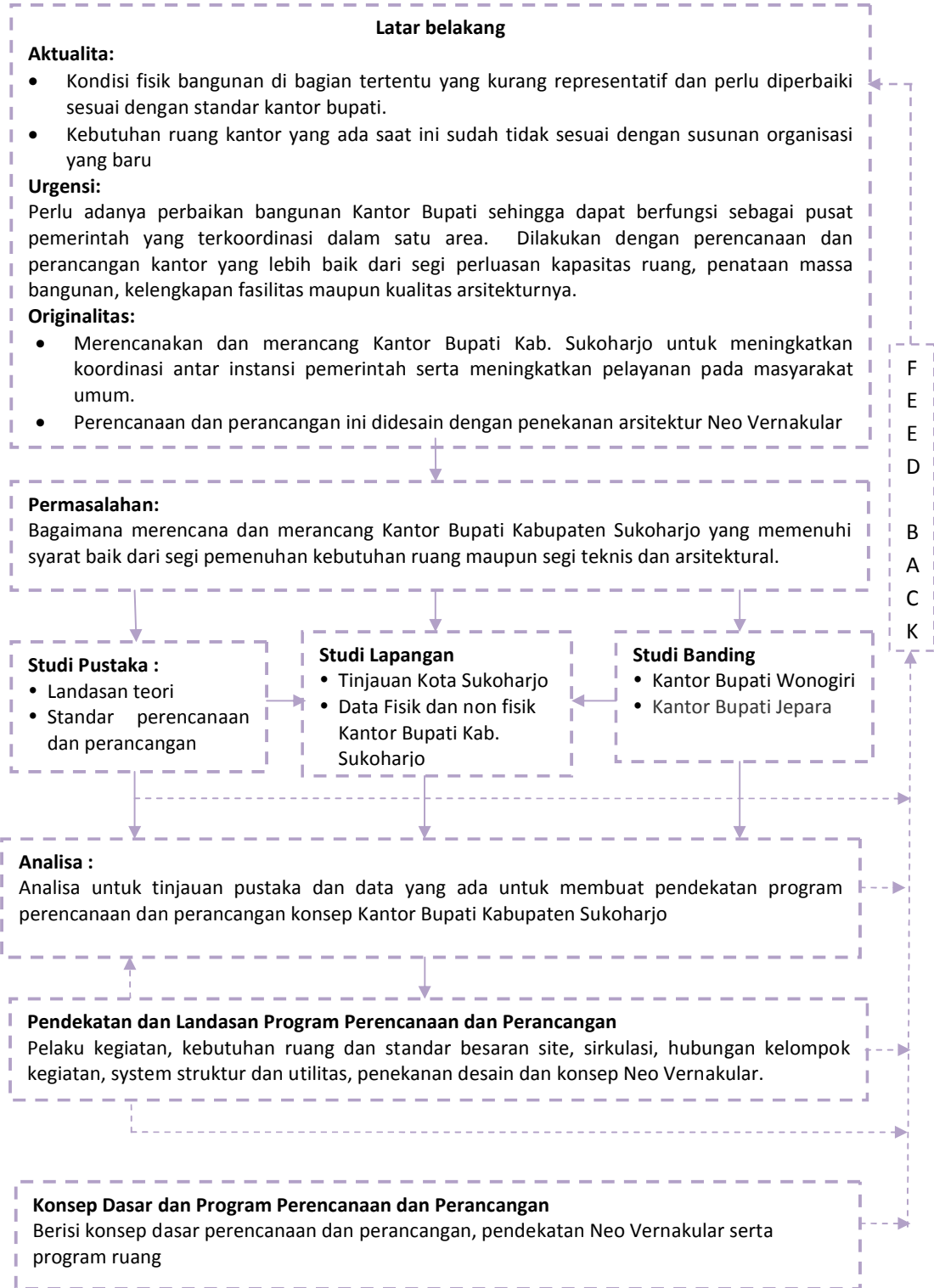
1.5.2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait sehingga diperoleh potensi dan informasi untuk perencanaan dan perancangan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo serta daya dukung lokasi dan tapak perencanaan.

1.5.3. Studi banding

Studi banding dilakukan untuk membuka wawasan mengenai penggunaan Kantor Pemerintah yang sudah ada, sebagai wacana dalam perencanaan dan perancangan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo.

1.6. Alur Pikir



1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara garis besar tema utama dalam penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur, yang didalamnya meliputi latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan, manfaat, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan pengumpulan data yang digunakan, serta kerangka pembahasan yang berisi pokok-pokok pikiran dalam tiap bab yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING

Meninjau tentang teori-teori yang dipakai untuk mendukung perencanaan dan perancangan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo, serta studi banding dari beberapa Kantor Bupati dari daerah lain, juga tinjauan arsitektur Neo-Vernakular.

BAB III TINJAUAN KABUPATEN SUKOHARJO

Berisi tentang tinjauan Kabupaten Sukoharjo beserta peraturan dan kebijakan pada daerah setempat serta tinjauan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

Berisi tentang kesimpulan, batasan dan anggapan permasalahan yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo.

BAB V PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Merupakan uraian pendekatan perencanaan Kantor Bupati dari beberapa aspek yang berkaitan dengan aspek fungsional,

kontekstual, kinerja, teknis, dan arsitektural. Pendekatan perancangan bangunan dengan pendekatan konsep Neo-Vernakular.

BAB VI PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang rumusan hasil pembahasan analisis aspek-aspek perencanaan dan perancangan bangunan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo.